



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT.9 KEL.
SIMPANG RIMBO KEC. ALAM BARAJO
KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183
FAX : (0741) 3081183

EMAIL : bptd-jambi@dephub.go.id

Nomor : UM.006/2/9/BPTD-JAMBI/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian
Kinerja (LMCK) Triwulan I Tahun 2025

Jambi, 9 April 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: PR.002/1/18/DJPD/2025 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai,
Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat.



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

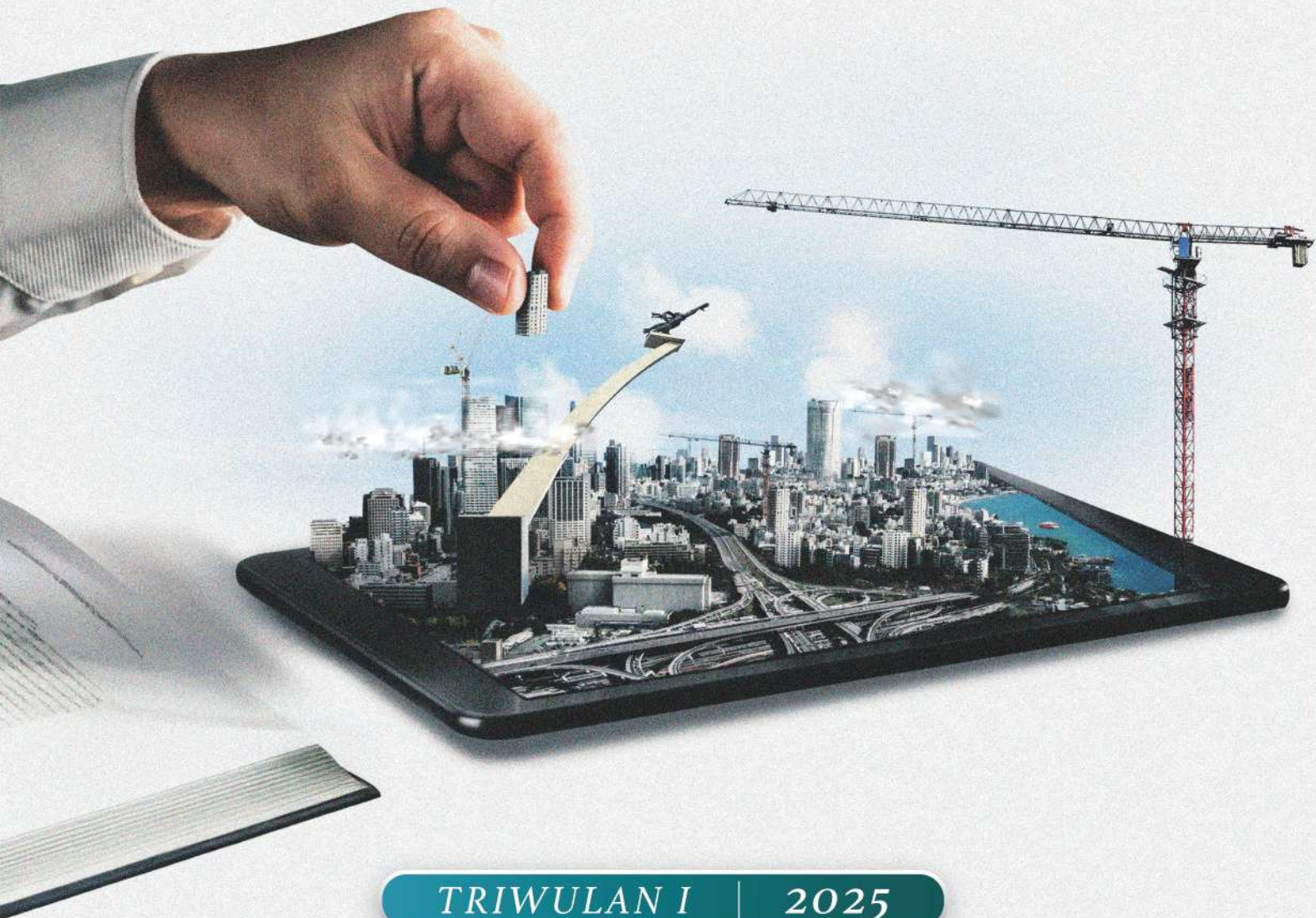
Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura	Penyusun Rencana dan Pelaporan	9/4/25	
		Dina Safitri	Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat	9/4/2025	
2.	Diperiksa	Alexander T.P Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	9/4/2025	
3.	Disetujui	Alexander T.P Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	9/4/2025	
		Herry Wanda	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		
		Ikra Surantha, S.T., M.T.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	9/4/2025	
		Riskan, A.Md LLAJ, S.E., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	9/4/2025	



LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



TRIWULAN I | 2025

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI



• KATA

PENGANTAR



KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.





Adapun isi dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I ini mencakup Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025, serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 9 April 2025

Kepala Balai,

Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



• RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel.

Dari tujuan diatas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2025 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sudah baik.

Total 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tahun 2024 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan sama dengan 100% (IKP=100%) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKP} < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 0% (target 100%);
2. Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);

3. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 4 lokasi (target 4 lokasi);
4. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 88,44% (target 88%);
5. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 57,53% (target 57%);
6. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 0% (target 100%);
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 53% (target 40%)
8. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 orang (target 1.800 Orang);
9. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 64% (target 50%);
10. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP terealisasi 0 Lokasi (target 1 lokasi);
11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai Nilai 45 (target Nilai 90);
12. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai Nilai 67,3 (target Nilai 90).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi pada Tahun 2025.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2.1. Bagan Struktur Organisasi	5
I.3. Sumber Daya Manusia.....	6
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	7
I.5. Sistematika Laporan.....	8
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	13
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	19
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	19
2.2.1 SK 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	24
IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	24
IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	28
IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	32
2.2.2 SK 2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	36
IKK2.1 Persentase Pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	36
IKK2.3 Persentase Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	39
2.2.3 SK 4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	43
IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	43
IKK3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Hubdat	47
IKK3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan	51
IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.....	54
IKK7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP	57
2.2.4 SK 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	61
IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	61
2.2.5 SK 1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel	65
IKK1.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Hubdat	65
II.3. Realisasi Anggaran	70

BAB III PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian	80
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	82

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain-lain yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Sumber Daya Manusia BPTD Kelas II Jambi	6
Tabel I.2.	Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025.....	14
Tabel I.3.	Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025.....	16
Tabel II.1.	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Triwulan I Tahun 2025.....	22
Tabel II.2.	Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
Tabel II.3.	Target dan realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
Tabel II.4.	Target dan realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	33
Tabel II.5.	Target dan realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan (SPM) di Terminal Tipe-A Terhadap PK Tahun 2025	37
Tabel II.6.	Target dan realisasi IKK Persentase Pelaksanaan (SPM) di Pelabuhan SDP Terhadap PK Tahun 2025.....	41
Tabel II.7.	Target dan realisasi IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Terhadap PK Tahun 2025.....	45
Tabel II.8.	Target dan realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Hubdat Terhadap PK Tahun 2025.....	48
Tabel II.9.	Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	52
Tabel II.10.	Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	55
Tabel II.11.	Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	58
Tabel II.12.	Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	62
Tabel II.13.	Tabel perhitungan Capaian Indikator Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.....	64
Tabel II.14.	Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	66
Tabel II.15.	Tabel perhitungan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	68
Tabel II.16.	Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025	70
Tabel II.17.	Rincian per per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025	70

Tabel II.18	Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025	71
Tabel II.19	Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2025	72
Tabel II.20	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025...	72
Tabel II.21	Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2025....	73
Tabel II.22	Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2025.....	74
Tabel II.23	Rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	74
Tabel II.24	Rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	76
Tabel II.25	Rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025	76
Tabel II.26	Anggaran Kegiatan yang terkena <i>Blokir</i>	77
Tabel II.27	Tabel efisiensi penggunaan sumber daya keuangan	77
Tabel II.28	Rincian penggunaan sumber daya manusia Tahun 2025	79
Tabel III.1	Tabel Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.... ..	29
Gambar II.3	Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	33
Gambar II.4	Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	37
Gambar II.5	Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	40
Gambar II.6	Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	45
Gambar II.7	Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	48
Gambar II.8	Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	52
Gambar II.9	Grafik Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025	55
Gambar II.10	Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	58
Gambar II.11	Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	62
Gambar II.12	Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraannya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib membuat Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas :

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan, Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Sarana, Prasarana, Lalu lintas dan angkutan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta bantuan

teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.1. Bagan Struktur Organisasi



I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di BPTD Kelas II Jambi adalah sebanyak 319 orang dengan rincian 169 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 148 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TOTAL
		PNS/PPPK	PPNPN	
1	KANTOR INDUK BPTD KELAS II JAMBI	49	22	71
	SUB BAGIAN TATA USAHA	15	17	32
	SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN	10	1	11
	SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN	13	1	14
	SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN & PENGAWASAN	11	3	14
2	TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	28	23	51
3	TERMINAL TIPE A SRI BULAN KAB. SAROLANGUN	8	12	20
4	TERMINAL TIPE A PULAU TUJUH BANGKO KAB. MERANGIN	11	14	25
5	TERMINAL TIPE A MUARA BUNGO KAB. MUARA BUNGO	16	14	30
6	UPPKB JAMBI MERLUNG	11	25	36
7	UPPKB MUARA TEMBESI	15	16	31
8	UPPKB SAROLANGUN	20	17	37
9	UPPKB SUNGAI PENUH		1	1
10	PELABUHAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL	4	3	7
11	PELABUHAN SUNGAI PS. ANGSO DUO	5		
12	PELABUHAN SUNGAI NIPAH PANJANG	2		
13	PELABUHAN SUNGAI MENDAHARA	3		3
	JUMLAH	172	147	319

I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat petunjuk teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah pusat yaitu penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung pembangunan prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah:

- a. Pengoperasian Terminal Penumpang dan UPPKB;
- b. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
- c. Penataan dan Pembinaan SDM Transportasi Darat;
- d. Perubahan *mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
- e. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
- f. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 adalah:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja.

I.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan I ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
- I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.2.1. SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
 - II.2.1.1 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - II.2.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2. SK. 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.2.1 IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.2 IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3. SK. 4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat

II.2.3.1 IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.2 IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.3 IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.4 IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.5 IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK. 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

II.2.4.1 IKK 5.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK. 1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
2. Refocusing Anggaran Tahun 2025
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2021 - 2025

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025
3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025
4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Lain-lain yang dianggap perlu.

I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 – 2029 masih dalam proses penyusunan dikarenakan masih menunggu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang masih dalam tahap proses penyusunan Indikator Kinerja. Untuk sementara menunggu Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi masih menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang sama dengan Tahun 2024.

I.6.1 Uraian / Narasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tahun 2025

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4.	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Jambi Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

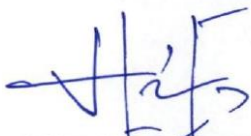
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

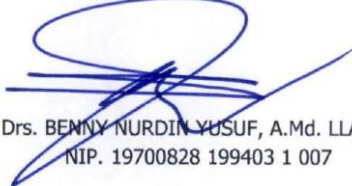


AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

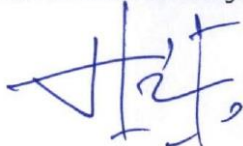
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayanan alur pelayanan SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 10.429.810.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 11.468.791.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.167.935.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.067.251.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 242.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.254.393.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 23.776.893.000

Pihak Kedua

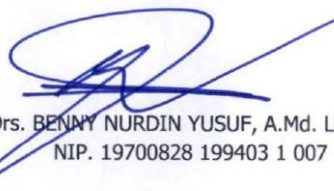
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi


Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang

direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025;

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2025.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Jambi Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Q1		
				T	R	C
SK 1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						67%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	0	0%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%
SK 2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat						101%
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88	88	88,4	100,45%
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57	57	57,53	100,9%
SK 4. Meningkatnya keselamatan transportasi darat						39%
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	0	0%
IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	40	40	53	68%
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800	1.800	0	0%
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	50	64	128%
IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0	0%
SK 5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat						50%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	45	50%
SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						75%
IKK1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	67,3	74,8%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Q1		
			T	R	C
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan					66,4%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					60,18%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$)					5
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$)					7

Selama tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 12 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Penyelenggaraan angkutan jalan perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani.

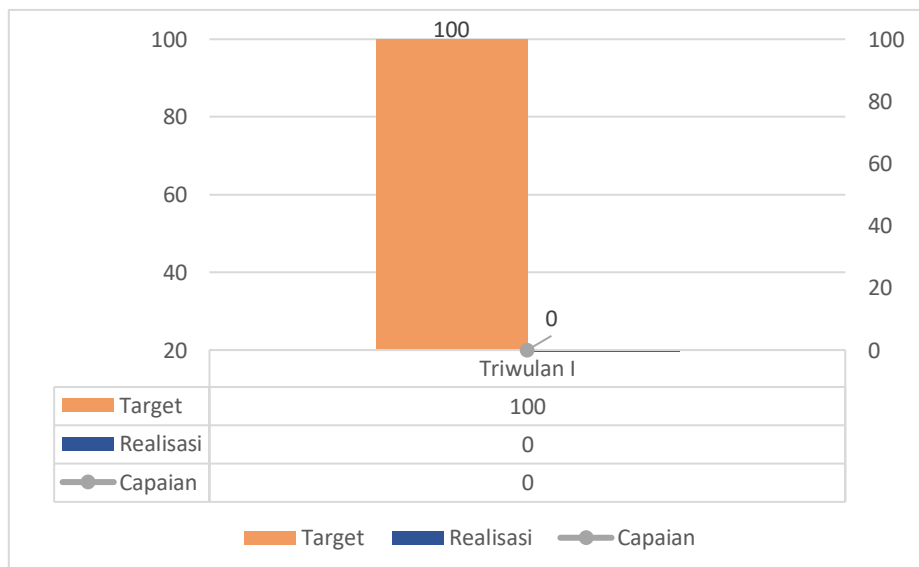
Keterangan:

Trayek yang dilayani adalah:

1. Desa Sungai Jernih – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
2. Desa Belukar Panjang – Terminal Tipe A Muara Bungo;
3. Desa Sari Mulya – Terminal Tipe A Muara Bungo;
4. Desa Pelayung – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
5. Desa Mekar Jaya – Terminal Muara Bulian – Terminal Alam Barajo Jambi.
6. Desa Suo-Suo – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
7. Kelurahan Mendahara Ilir (Kantor Camat Mendahara) – Pasar Kamis (Kel. Parit Culum I);
8. Kelurahan Simpang (Kantor Camat Berbak) – Pasar Kamis (Kel. Parit Culum I);
9. Desa Panca Karya – Terminal Sribulan Sarolangun.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dibawah ini :



Gambar II.1 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian realisasi setiap Triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025.

Tabel II.2 Tabel Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	100
2.	Realisasi	0
3.	Capaian	0%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025;

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya.

c. Faktor-faktor keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dan pemerintah daerah dalam kegiatan

pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;

2. Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan perintis;
3. Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan;
4. Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut;
5. Minat masyarakat yang tinggi terhadap angkutan perintis tersebut.

d. Faktor-faktor kegagalan atau potensi kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Kegiatan tersebut masih menunggu terkait efisiensi anggaran;
2. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
3. Load factor yang rendah;
4. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh;
5. Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

Keterangan:

RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{2.808} \times 100\% = 0\%$$

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2025 mencapai 0%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 4.799.830.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur pada POK yaitu Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional), Kode Anggaran: 4637.QAH.001.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Jambi dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum;
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat;
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal;
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum;
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

2.2.1.2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal Tipe A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe A adalah Terminal Tipe A yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani angkutan barang di jalan. Terminal

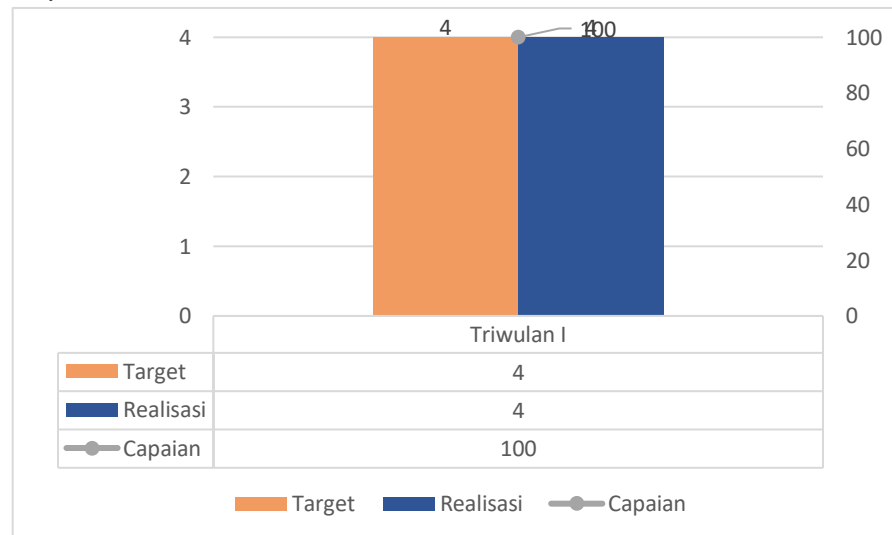
Tipe A yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ada 4 Terminal yaitu:

1. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
2. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
3. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
4. Terminal Tipe A Muara Bungo.

Sedangkan Terminal Barang tidak dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Selanjutnya maksud dari IKK tersebut adalah untuk mengetahui berapa jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2025 sebanyak 4 lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.2 Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian realisasi setiap Triwulan untuk Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2025.

Tabel II.3 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	4
2.	Realisasi	4
3.	Capaian	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi memiliki target 4 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Terminal Tipe A yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ada 4 Terminal yaitu:

1. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
2. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
3. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
4. Terminal Tipe A Muara Bungo.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;

2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat;
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor;

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum yang telah disediakan;
2. Fasilitas umum di Terminal masih kurang memadai bagi pengguna layanan;
3. Kurang terpenuhi kebutuhan operasional Terminal dikarenakan minimnya anggaran operasional pada Terminal.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK\ 1.3 = \text{Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 8.119.721.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 372.711.326,- atau mencapai 4,59% dengan nomenklatur pada POK yaitu Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, Kode Anggaran: 4638.CDP.040.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada Organda serta masyarakat pengguna angkutan umum untuk turut serta meramaikan terminal yang sudah ada;
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal Tipe-A;
5. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
6. Meningkatkan minat Masyarakat agar lebih banyak menggunakan Transportasi Umum;
7. Meningkatkan pendapatan PNBK di Terminal Tipe-A.

2.2.1.3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Sedangkan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan Sungai, Danau, Waduk, dan Terusan. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang Beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

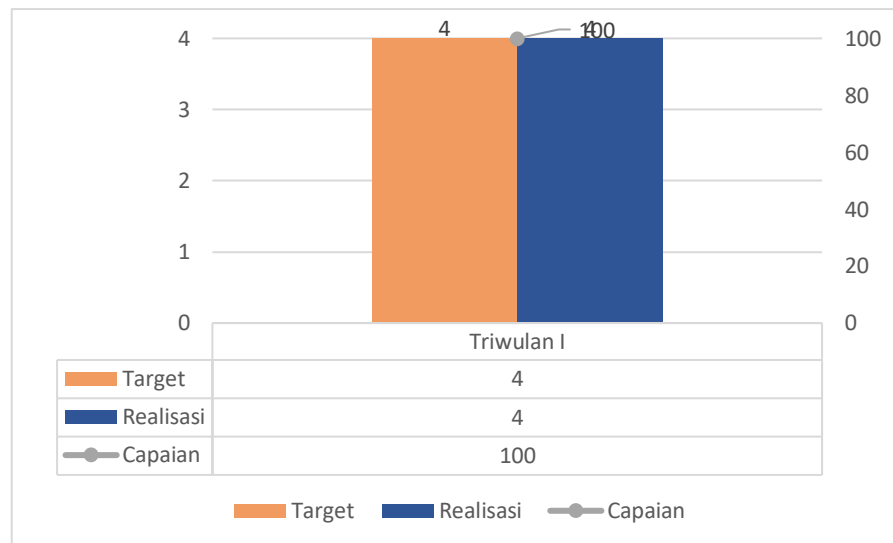
BPTD Kelas II Jambi memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan transportasi angkutan umum berjalan dengan baik.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target 4 Lokasi. Berdasarkan PM 12 Tahun 2025 Jumlah Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada BPTD Kelas II Jambi, yaitu :

1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal;
2. Pelabuhan Sungai Angso duo;
3. Pelabuhan Sungai Nipah Panjang;
4. Pelabuhan Sungai Mendahara.

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 4 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian sebagai berikut:



Gambar II.3 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi yang beroperasi Tahun 2025.

Tabel II.4 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	4
2.	Realisasi	4
3.	Capaian	100%

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target 4 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Berdasarkan PM 12 Tahun 2025 Jumlah Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada BPTD Kelas II Jambi, yaitu :

1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal;
2. Pelabuhan Sungai Angso duo;
3. Pelabuhan Sungai Nipah Panjang;
4. Pelabuhan Sungai Mendahara.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran operasional pelabuhan;
2. Peningkatan pengawasan operasional Pelabuhan;
3. Petugas yang kompeten dibidangnya;
4. Koordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
5. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. SDM yang kurang memadai;
2. Minimnya pelaksanaan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
3. Tidak optimalnya pengawasan operasional Pelabuhan;
4. Pemeliharaan dan perawatan fasilitas di Pelabuhan yang tidak maksimal sehingga banyak fasilitas di Pelabuhan yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$IKK\ 1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun } (n)$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.215.322.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 952.468.435,- atau mencapai 78,37% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dikelola, Kode Anggaran: 4638.CDP.045.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik;
3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun;
4. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
5. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP.

2.2.2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A;
2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

2.2.2.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

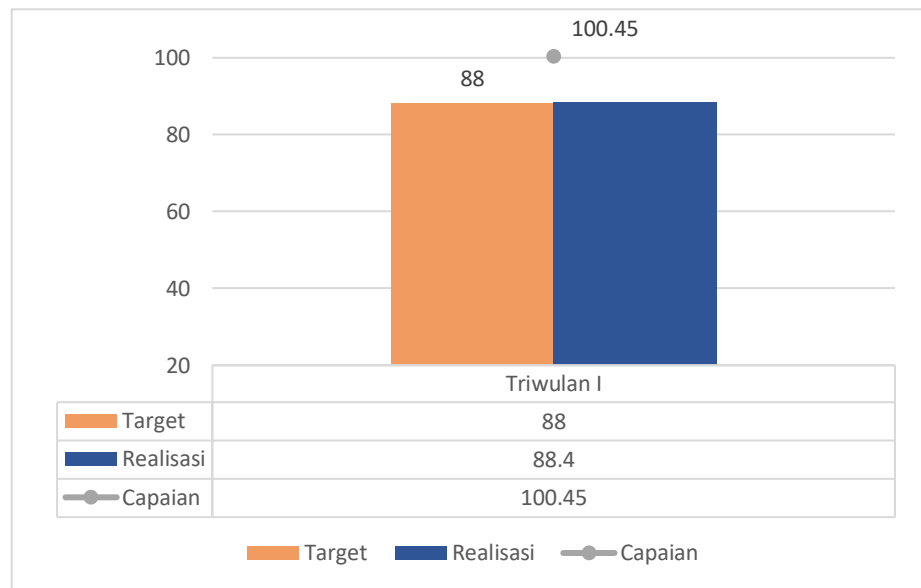
a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan.

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2025 sebesar 88,4%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 88% maka capaian kinerja mencapai 100,45%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.4 Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2025.

Tabel II.5 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	88
2.	Realisasi	88,4
3.	Capaian	100,45%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4951/AJ.002/DRJD/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A;

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A memiliki target sebesar 88%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Pusat dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A;
2. Pelaksanaan operasional terminal tipe A sesuai standar operasional prosedur pengoperasian terminal penumpang tipe A yang telah ditetapkan;
3. Fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Terpenuhinya Keamanan, Kebersihan, Ketertiban yang ada di Terminal.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebagai berikut :

1. Ketidakpuasan masyarakat saat menggunakan layanan transportasi yang digunakan;
2. Pelaksanaan operasional Terminal Tipe A yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur pengoperasional Terminal penumpang Tipe A;
3. Kurangnya monitoring terhadap fasilitas di Terminal dan operasional kendaraan yang beroperasi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

pada Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu:

$$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{88,4}{88} \times 100\% = 100,45\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 453.360.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kode Akun: 523111.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A.

2.2.2.2. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

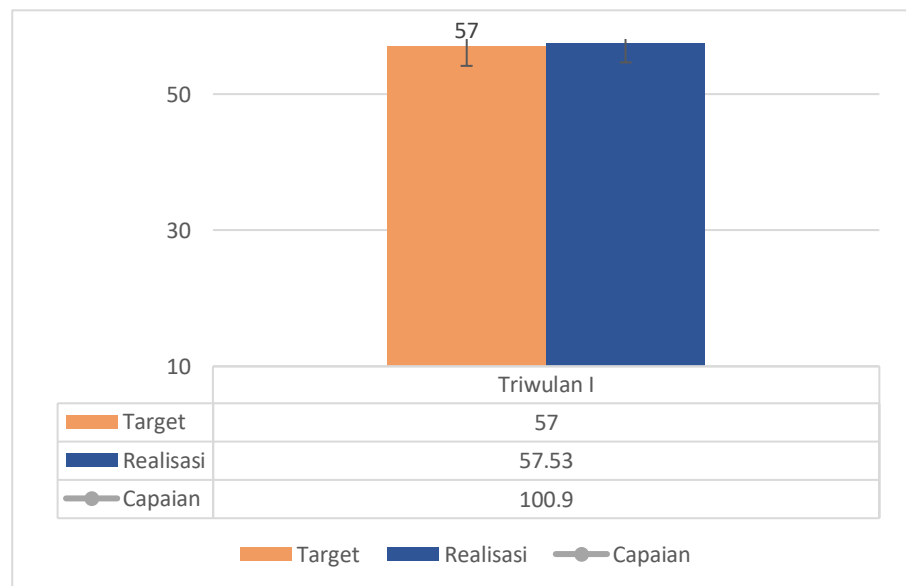
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan,

Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM. Adapun BPTD Kelas II Jambi sebagai pengawas pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Jambi untuk memeriksa dan mengevaluasi pemenuhan SPM.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 sebesar 57,53%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 57% maka capaian kinerja mencapai 100,9%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.5 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025.

Tabel II.6 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	57
2.	Realisasi	57,53
3.	Capaian	100,9%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP memiliki target sebesar 57%. Target pada Tahun 2025 lebih rendah dari Tahun 2024 dikarenakan dari hasil diskusi rapat pelaksanaan SPM hanya dilaksanakan pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal. Untuk Pelabuhan Sungai belum memiliki Indikator Perhitungan SPM nya.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah pusat dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan Pelabuhan SDP;
2. Pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP sesuai Standar Operasional Prosedur pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan pengawasan secara periodik.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. SDM yang kurang memadai dan kurang berkompeten;
2. Pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan;
3. Masih ditemukannya kendaraan ODOL yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberang sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP hanya dilaksanakan pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal dikarenakan untuk Pelabuhan Sungai belum ada dasar perhitungan yang mengatur. Perhitungan pada Pelabuhan Penyeberangan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{57,53}{57} \times 100\% = 100,9\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 197.650.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 34.368.700,- atau mencapai 17,39% dengan nomenklatur pada POK yaitu Operasional Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Anggaran: 4638.CDP.045 Kode Sub Komponen: A.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.

2.2.3. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
4. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

2.2.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal**a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan**

Kebutuhan perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

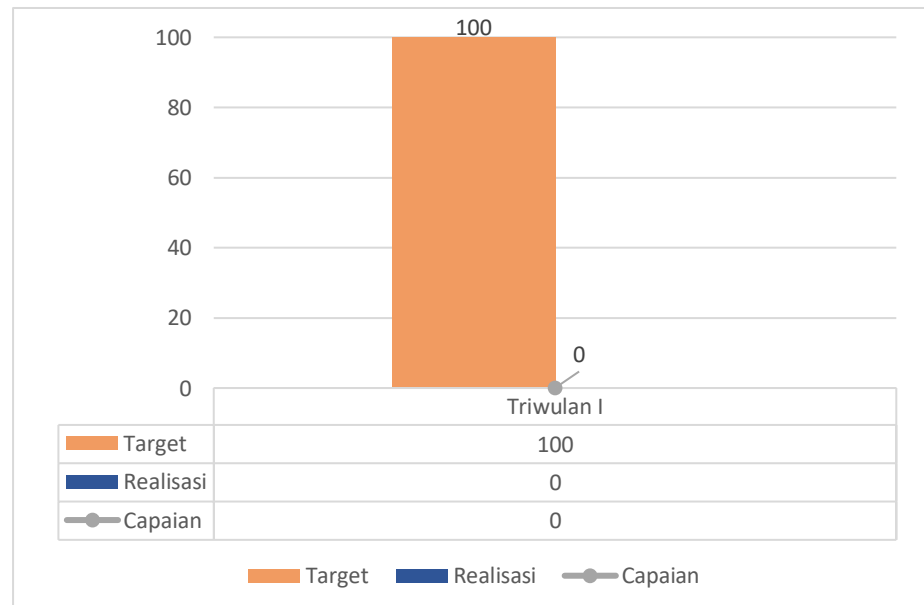
Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Jaringan Jalan Nasional berdasarkan KP. 209/KPTS/M/2015.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 sebesar 0%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 0%. Kegiatan tersebut masih menunggu arahan terkait efisiensi anggaran. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.6 Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2025.

Tabel II.7 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	100
2.	Realisasi	0
3.	Capaian	0%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal memiliki target sebesar 100% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang dalam pemasangan perlengkapan jalan;
2. Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;

3. Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

1. Anggaran kegiatan tersebut terkena Efisiensi anggaran.
2. Monitoring dan evaluasi yang masih kurang terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan.
3. Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
4. Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK3.1 = \frac{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{23.339} \times 100\% = 0\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 13.628.028.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur pada POK yaitu Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional), Kode Anggaran: 4639.RAC.053.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak;

2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga faslitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
3. Berusaha melaksanakan pembangunan yang tepat waktu.

2.2.3.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

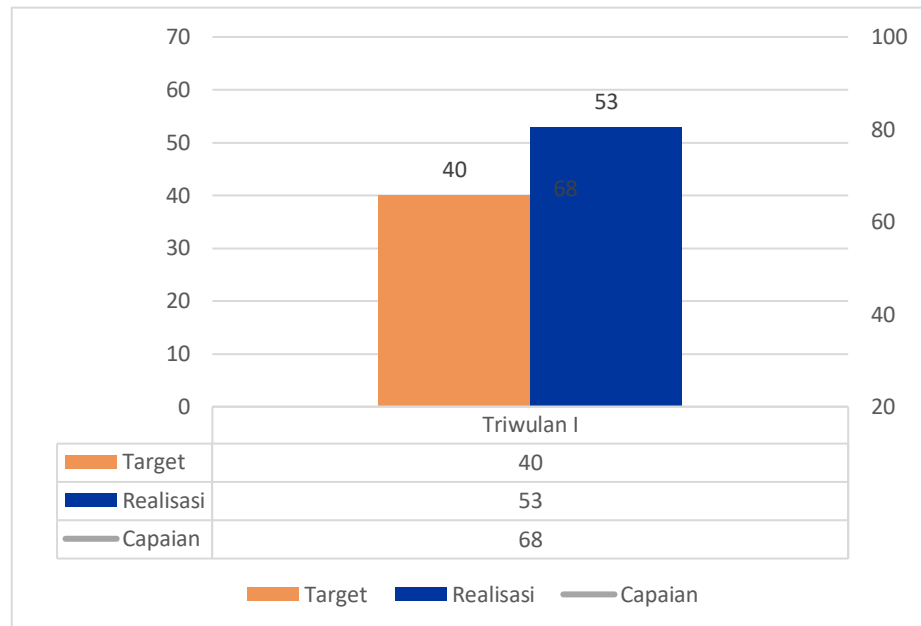
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Pada IKK tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor disebut UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran Over Dimensi dan Over Load. BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Satpel UPPKB untuk pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

1. Tata cara pemuatan barang;
2. Dimensi kendaraan Angkutan Barang;
3. Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
4. Dokumen Angkutan Barang;
5. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
6. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 sebesar 53%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 40%, maka capaian kinerja mencapai 68%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.7 Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.

Tabel II.8 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	40
2.	Realisasi	53
3.	Capaian	68

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
4. Pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan bisa dipedomani melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.736/AJ/108/DRJD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025 target awal Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 40%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Kesadaran dari pihak perusahaan angkutan barang akan bahayanya *Over Dimention Over Load* (ODOL)
2. Para sopir dan armada angkutan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
3. Ketegasan petugas dalam melakukan pemeriksaan kendaraan.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Tidak patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
2. Masih banyaknya kendaraan yang tidak memasuki UPPKB untuk melakukan pengecekan kelaikan kendaraan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan realisasi Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2.134}{3.991} \times 100\% = 53\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{target} - (\text{rata-rata} - \text{target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(40\% - (53\% - 40\%))}{40\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 68\%.$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 6.363.734.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 523.182.488,- atau mencapai 8,22% dengan nomenklatur pada POK yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola, Kode Anggaran: 4639.CDP.077.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait *Over Dimensi Over Load* (ODOL) kendaraan barang;
2. Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan *Over Dimensi Over Load* (ODOL);
3. Menyelenggarakan Gakkum bersama Dinas Perhubungan setempat, anggota Polisi, serta Jasa Raharja.

2.2.3.4 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

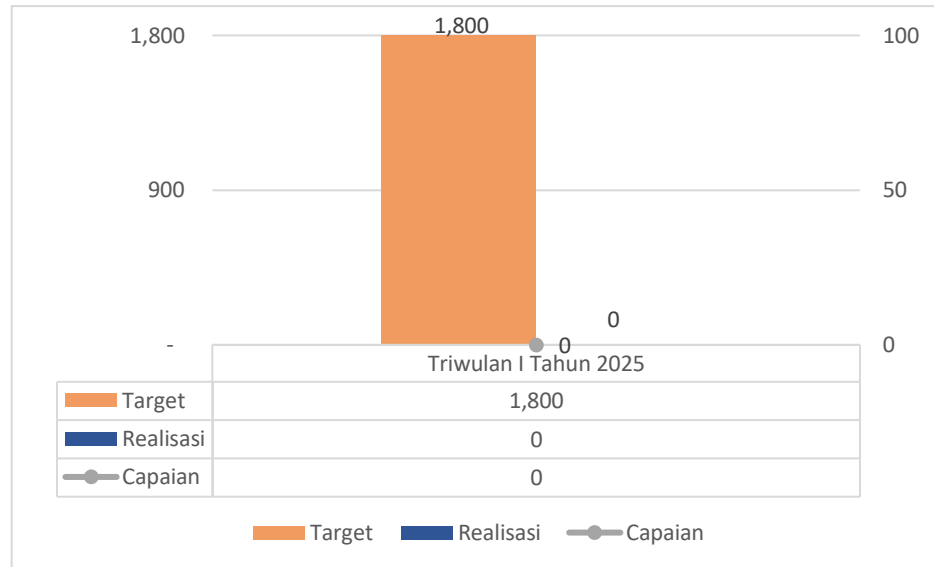
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

Jumlah Masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan di setiap Balai Pengelola Transportasi Darat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan pada Tahun 2025 sebanyak 0 Orang jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebanyak 1.800 Orang, maka capaian kinerja mencapai 0%. Pelaksanaan kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada bulan September Tahun 2025. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.8 Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Tahun 2025 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Tahun 2025.

Tabel II.9 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	1.800
2.	Realisasi	0
3.	Capaian	0%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

3. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

b. Kronologi Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan memiliki target sebanyak 1.800 Orang.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
2. Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

1. Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
2. Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
3. Tidak tersampainya informasi keselamatan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan sosialisasi;

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

IKK3.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1.800} \times 100\% = 0\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional), Kode Anggaran: 4639.PEH.049.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan:

1. Melakukan edukasi kesadaran tertib berlalu lintas;
2. Memberikan hiburan menarik dalam acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan;
3. Melakukan koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas.

2.2.3.6 IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

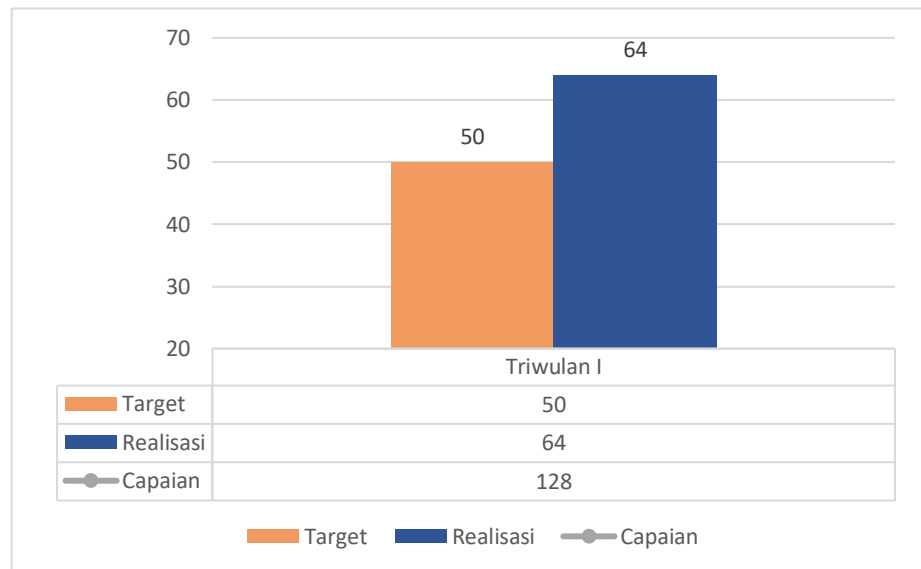
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah unit Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah seluruh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 sebesar 64% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 50% maka capaian kinerja mencapai 128%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.9 Grafik Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025.

Tabel II.10 Tabel Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	50
2.	Realisasi	64
3.	Capaian	128%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/aj.402/drjd/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki target sebesar 80% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota;
2. Pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai Standar Operasional Prosedur standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah ditetapkan.
3. Tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kompetensi.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Tidak memiliki gedung uji;
2. Kurangnya perawatan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum memenuhi syarat akreditasi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK\ 7a = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{7}{11} \times 100\% = 64\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{64}{50} \times 100\% = 128\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 217.160.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Kode Anggaran: 4640.FAE.923 Detil Kegiatan: B Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Mengadakan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi SDM terhadap petugas penguji berkala kendaraan bermotor;
2. Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Rutin melaksanakan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor.

2.2.3.7 IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

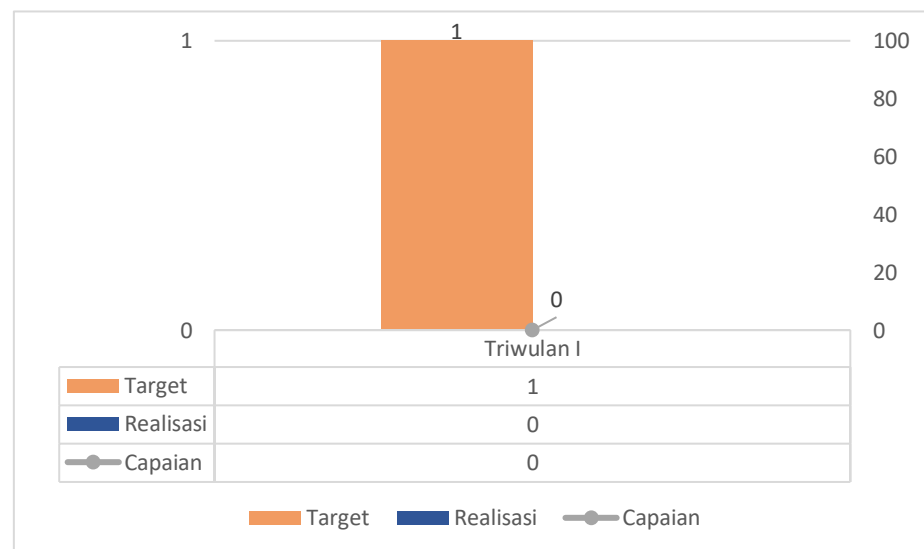
Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai,

alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2025 sebanyak 0 Lokasi, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebanyak 1 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 0%. Kegiatan tersebut masih menunggu arahan terkait efisiensi anggaran. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.10 Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2025.

Tabel II.11 Tabel Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	1
2.	Realisasi	1
3.	Capaian	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP memiliki target sebanyak 1 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran;
2. Kondisi cuaca buruk;
3. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
4. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2025

IKK 7b = Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n)

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0% dengan nomenklatur pada POK yaitu Rambu Sungai dan Danau, Kode Anggaran: 4639.CAC.065.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan;
4. Menginventarisasi kembali jumlah rambu sungai yang akan dipasang;
5. Memasang rambu sungai di daerah yang belum terpasang.

2.2.4. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

2.2.4.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a. Aspek Perencanaan;
- b. Aspek Kepegawaian (SDM);
- c. Aspek Keuangan;
- d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (Umum).

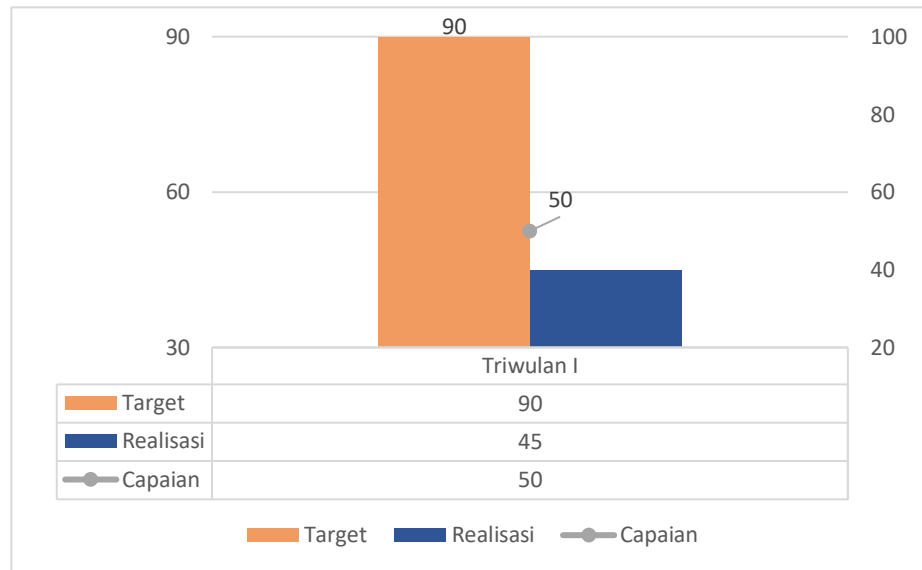
Aspek perencanaan dimulai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Penginputan Aplikasi e-Performance.

Aspek Kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja dan disiplin.

Aspek Keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 yaitu Nilai 45, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu Nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 50%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.11 Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025.

Tabel II.12 Tabel Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	90
2.	Realisasi	45
3.	Capaian	50%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target Nilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya. Penyelenggaraan kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang telah direncanakan;
3. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk masing-masing kegiatan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran;
2. Tidak adanya anggaran;
3. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
4. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.13 Tabel perhitungan Capaian Indikator Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

No	Uraian	Bobot	Nilai
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	4,7%
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	0%
2	Perjanjian Kinerja	5%	1,7%
3	pengisian input e-planning	5%	1,7%
4	pengisian input e-performance	5%	1,25%
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	17,1%
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	6%
2	Kompetensi	10%	8,1%
3	Kinerja	8%	2%
4	Disiplin	1%	1%
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	3,12%
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	20,2%
Total Nilai		100%	45%

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{45}{90} \times 100\% = 50\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 4.067.251.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 55.073.500,- atau mencapai 1,35% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Kode Anggaran: 4640.FAE.923.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Jambi secara optimal;
2. Rutin melaksanakan evaluasi secara internal terkait kinerja yang sedang berlangsung guna meminimalisir tidak tercapainya target kinerja tahun berjalan;
3. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPTD Kelas II Jambi.

2.2.5. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel

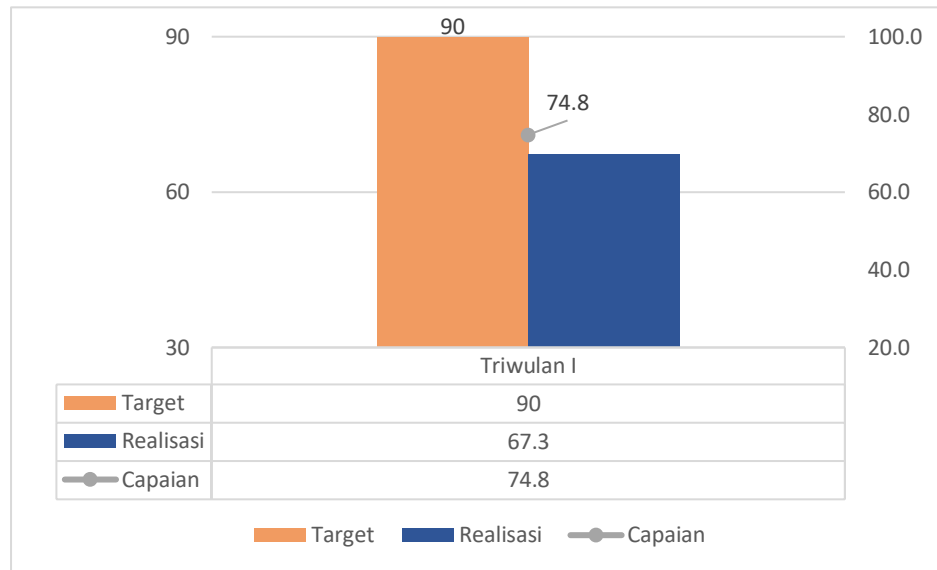
2.2.5.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 yaitu Nilai 67,3, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu Nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 74,8%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK:



Gambar II.12 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025.

Tabel II.14 Tabel Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Rincian	Triwulan I
1.	Target	90
2.	Realisasi	67,3
3.	Capaian	74,8%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2025 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 sebagai berikut:
 - a) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b) Birokrasi yang kapabel;
 - c) Pelayanan publik yang prima.

2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat memiliki target Nilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya. Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Program Dukungan Manajemen.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Penyerapan anggaran yang maksimal dan tepat guna;
3. Pelaksanaan evaluasi setiap bulan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran;
2. Optimalisasi anggaran yang kurang tepat;
3. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
4. Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran;
3. Bobot:
 - a) Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);

- b) Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
c) Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel II.15 Tabel Perhitungan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

No	Uraian	Bobot	Nilai
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	9,1%
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15%	5%
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10%	4,1%
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	20,2%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	38%
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	20%
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	8%
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	10%
Total Nilai		100%	67,3%

Cara Perhitungan:

1. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
2. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;
3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

- a) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

- b) Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

- c) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

*) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan

Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security

**) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor

***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{67,3}{90} \times 100\% = 74,8\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 30.273.286.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 6.209.394.623. atau mencapai 20,51% dengan nomenklatur pada POK yaitu Program Dukungan Manajemen Kode Anggaran: 022.03.WA.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran BPTD Kelas II Jambi;
2. Pimpinan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi yang mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

II.3.1.1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu per Triwulan I DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 78.407.073.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.16 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2025

Sumber Dana	Pagu (Rp)	%
RM	75.189.913.000	95,90%
PNBP	3.217.160.000	4,10%
SBSN	-	-
Total	78.407.073.000	100%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu per Triwulan I DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 78.407.073.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.17 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
Belanja Pegawai	23.776.893.000	30,32%
Belanja Barang	41.261.376.000	52,62%
Belanja Modal	13.368.804.000	17,05%
Total	78.407.073.000	100%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Tahun 2025 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000;
2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 15 Januari 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000;
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 22 Februari 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000;
4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 78.407.073.000.

II.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan dengan adanya Revisi DIPA BPTD Kelas II Jambi yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 3 (tiga) kali revisi DIPA. Berikut adalah rincian histori revisi per Sumber Dana, per Jenis Belanja.

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025**Tabel II.18** Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2025

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-1	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-2	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000
Revisi Ke-3	75.189.913.000	3.217.160.000	-	78.407.073.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025**Tabel II.19** Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2025

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu Awal	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-1	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-2	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000
Revisi Ke-3	23.776.893.000	41.261.376.000	13.368.804.000	78.407.073.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025**Tabel II.20** Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu awal	Perubahan	Pagu Per Triwulan I
Belanja Pegawai	23.776.893.000	-	23.776.893.000
RM	23.776.893.000	-	23.776.893.000
PNBP	-	-	-
SBSN	-	-	-
Belanja Barang	41.261.376.000	-	41.261.376.000
RM	41.044.216.000	-	41.044.216.000
PNBP	217.160.000	-	217.160.000
SBSN	-	-	-
Belanja Modal	13.368.804.000	-	13.368.804.000
RM	10.368.804.000	-	10.368.804.000
PNBP	3.000.000.000	-	3.000.000.000
SBSN	-	-	-
TOTAL	78.407.073.000	-	78.407.073.000

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2025

Tabel II.21 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I
403845	BPTD Kelas II Jambi	78.407.073.000	-	78.407.073.000
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	48.133.787.000	-	48.133.787.000
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	10.429.810.000	-	10.429.810.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	11.468.791.000	-	11.468.791.000
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	22.167.935.000	-	22.167.935.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.067.251.000	-	4.067.251.000
WA	Program Dukungan Manajemen	30.273.286.000	-	30.273.286.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	242.000.000	-	242.000.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.254.393.000	-	6.254.393.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	23.776.893.000	-	23.776.893.000

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.1.3. Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2025

Berikut adalah rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2025:

Tabel II.22 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2025

No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Triwulan I (Rp)	Realisasi Triwulan I (Rp)	%
1	2020	88.949.535.000	88.649.535.000	12.491.200.597	14,09%
2	2021	129.371.473.000	98.526.002.000	10.833.725.243	11,00%
3	2022	65.786.704.000	61.406.971.000	10.050.537.080	16,37%
4	2023	101.360.757.000	101.360.757.000	14.403.929.167	14,21%
5	2024	88.970.577.000	88.970.577.000	13.079.056.704	14,70%
6	2025	78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,65%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2. Realisasi Anggaran Anggaran Tahun 2025**II.3.2.1. Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025:

Tabel II.23 Rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%
403845	BPTD Kelas II Jambi	78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,65%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	48.133.787.000	48.133.787.000	1.834.960.230	3,81
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	10.429.810.000	10.429.810.000	-	-
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	11.468.791.000	11.468.791.000	816.239.538	7,12

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%
403845	BPTD Kelas II Jambi	78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,65%
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	22.167.935.000	22.167.935.000	963.647.192	4,35
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.067.251.000	4.067.251.000	55.073.500	1,35
WA	Program Dukungan Manajemen	30.273.286.000	30.273.286.000	7.296.437.061	24,10
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	242.000.000	242.000.000	-	-
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.254.393.000	6.254.393.000	1.335.288.551	21,35
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	23.776.893.000	23.776.893.000	5.961.148.510	25,07

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2.2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025:

Tabel II.24 Rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Alokasi (Tw I)	Realisasi Pagu TW I	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	23.776.893.000	23.776.893.000	5.961.148.510	25,07
2.	Belanja Barang	41.261.376.000	41.261.376.000	3.170.248.781	7,68
3.	Belanja Modal	13.368.804.000	13.368.804.000	-	-
Total		78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,65

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2.3. Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025:

Tabel II.25 Rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2025

No.	Sumber Dana	Pagu Awal	Pagu Alokasi (Tw I)	Realisasi Pagu TW I	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1.	RM	75.189.913.000	75.189.913.000	9.131.397.291	12,14
2.	PNBP	3.217.160.000	3.217.160.000	-	-
3.	SBSN	-	-	-	-
Total		78.407.073.000	78.407.073.000	9.131.397.291	11,65

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang diblokir dikarenakan efisiensi anggaran oleh Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2025, detail sebagai berikut:

Tabel II.26 Anggaran Kegiatan yang terkena *Blokir*

Automatic Adjustment	Rp.
Total Pagu Anggaran	78.407.073.000
Total Nilai Terkena AA	33.589.530.000
Akun 52 Belanja Barang	22.129.619.000
Akun 53 Belanja Modal	11.459.911.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

II.3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dan Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya manusia:

II.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2025

Tabel II.27 Tabel efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I		
		% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	67%	2,92%	63,75%
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	101%	0,053%	100,64%
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	39%	2,44%	36,66%
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	50%	1,35%	48,65%
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	75%	20,51%	54,27%
Total		66%	5,45%	60,79%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 66% dengan capaian keuangan sebesar 5,45% menunjukkan angka efisiensi sebesar 60,79%.

II.3.3.2. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya manusia**Tabel II.28** Rincian penggunaan sumber daya manusia Tahun 2025

No.	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	640	319	49,84%	100%	66%	66%

Sumber: Pengelola Kepegawaian

Berdasarkan tabel data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 66% menunjukkan capaian SDM sebesar 49,84% dengan realisasi sebanyak 319 SDM dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 640 SDM , dimana realisasi tersebut terdiri atas 170 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 147 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

II.3.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala masih rendahnya daya serap anggaran antara lain:

- Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
- Masih adanya beberapa kegiatan yang anggaran nya terkena Efisiensi Anggaran;
- Masih terdapat Indikator Kinerja yang belum mencapai target dikarenakan kegiatan terkena Efisiensi Anggaran.



BAB III

PENUTUP

BAB III**PENUTUP****III.1. Ringkasan Capaian**

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2025 ini terdapat 12 (Dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 0% (target 100%);
 - 2) Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 3) Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 4) Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 88,44% (target 88%);
 - 5) Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 57,53% (target 57%);
 - 6) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 0% (target 100%);
 - 7) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 53% (target 40%)
 - 8) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 0 orang (target 1.800 Orang);
 - 9) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 64% (target 50%);
 - 10) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP terealisasi 0 Lokasi (target 1 lokasi);
 - 11) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai Nilai 45 (target Nilai 90);
 - 12) Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai Nilai 67,3 (target Nilai 90).

2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *Zero Accident*.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1 Tabel Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2025	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Triwulan I			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Subsidi operasional angkutan jalan	Jumlah Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	0	0%	Belum Tercapai	Kegiatan tersebut dalam tahap proses lelang (tahap pembuktian dokumen).	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2025	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Triwulan I			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
		Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	4	4	100%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2025	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Triwulan I			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
		Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	Jumlah Pelabuhan SDP	Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP	4	4	100%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	88	88,4	100%	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	57	57,53	101%	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang	%	100	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan	100	0	0%	Belum Tercapai	Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2025	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Triwulan I			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
		terhadap kondisi ideal			Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)		pemasangan perlengkapan jalan			#DIV/0!		arahan terkait pelaksanaan anggaran.	dan Pengawasan
					Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)					#DIV/0!			
		Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	40	Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB.	Jumlah kendaraan barang yang ditimbang / diperiksa	Menurunnya jumlah kendaraan barang yang melanggar	40	53	133%	Belum Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800	Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1.800	-	#VALUE!	Belum Tercapai	Kegiatan rencana akan dilaksanakan pada bulan September dan masih menunggu arahan terkait efisiensi anggaran.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2025	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Triwulan I			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
		Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	Kegiatan Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Melaksanakan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.	Terlaksananya akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	50	64	128%	Tercapai	Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari termasuk supervisi	Melaksanakan pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	Terlaksananya pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	1	0	0%	Belum Tercapai	Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu arahan terkait efisiensi anggaran.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Melaksanakan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Terlaksananya Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	90	45	50%	Tercapai	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Program Dukungan Manajemen	Melaksanakan Program Dukungan dan Manajemen	Terlaksananya Program Dukungan dan Manajemen	90	67,3	75%	Tercapai	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkantoran yang baik	Subbag Tata Usaha



LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN

20 25

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2.	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3.	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4.	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Jambi, 1 Desember 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura, S.Kom., M.Si.	Penyusun Rencana dan Pelaporan	06/01/2025	
		Dina Safitri, S.H.	Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat	06/01/2025	
2.	Disetujui	Alexander T.P. Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	6/1/2025	
		Herry Wanda	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	6/1/2025	
		Ikra Surantha, S.T., M.T.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	6/1/2025	
		Riskan, A.Md LLAJ, S.E., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	6/1/2025	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

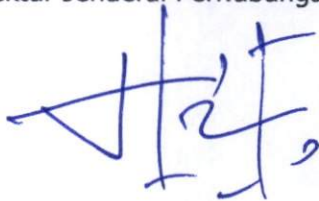
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 10.429.810.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 11.468.791.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.167.935.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.067.251.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 242.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.254.393.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 23.776.893.000

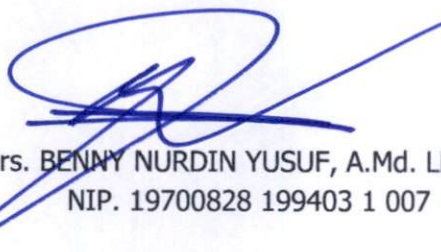
Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II JambiDr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	40
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 10.429.810.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 11.468.791.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.167.935.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.067.251.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 242.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.254.393.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 23.776.893.000

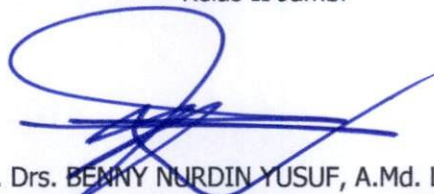
Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II JambiDr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab	
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Kegiatan layanan angkutan jalan perintis	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	4.799.830.000	- Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A, yaitu: - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.119.721.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di BPTD Kelas II Jambi: - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.349.070.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	88	453.360.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	57	197.650.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	11.159.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)													949.028.000	
						3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)													1.520.000.000	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	40	1. Pelaksanaan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah lalu lintas harian rata-rata angkutan barang di UPPKB. Adapun pelaksanaan dilaksanakan pada UPPKB sebagai berikut: 1. UPPKB Jambi Merlung; 2. UPPKB Tembesi; 3. UPPKB Pelawan Sarolangun; 4. UPPKB Sungai Penuh (Tidak beroperasi).	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	6.363.734.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	900	900	-	-	250.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	1. Pelaksanaan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	45	50	217.160.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (1 Paket)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.000.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	80	90	4.067.251.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	80	90	30.273.286.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, 6 Januari 2025
Kepala BPTD Kelas II Jambi

Dr. Drs. BENNY MURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

BULAN MARET TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume				
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	Jumlah Persentase Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Jalan Perintis	24	100	4.799.830.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	Kegiatan tersebut dalam tahap proses lelang (tahap pembuktian dokumen).	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	4	100	8.119.721.000	100	4	372.711.326	100%	4,59%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	Jumlah Pelabuhan SDP	Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.349.070.000	100	4	43.611.700	100%	3,23%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	88	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	22	100	453.360.000	100	88,4	0	402%	0%	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	57	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	14	100	197.650.000	100	57,53	34.368.700	411%	17,39%	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	24	100	949.028.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu arahan terkait pelaksanaan anggaran.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)					1.520.000.000	100		0					
						3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)					11.159.000.000	100		0					
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	40	1. Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB.	Jumlah kendaraan barang yang ditimbang / diperiksa	Menurunnya jumlah kendaraan barang yang melanggar	40	100	6.363.734.000	100	53	523.182.488	67,5%	8,22%	Belum Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1.800	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	100	250.000.000	100	-	0	0%	0%	Belum Tercapai	Kegiatan rencana akan dilaksanakan pada bulan September dan masih menunggu arahan terkait efisiensi anggaran.	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	1. Kegiatan Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Melaksanakan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.	Terlaksananya akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	12,5	100	217.160.000	100	64	0	512%	0%	Tercapai	Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-3				Realisasi Bulan-3		Capaian Bulan-3		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume			
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari termasuk supervisi	Melaksanakan pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	Tertaksananya pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	1	100	1.000.000.000	100	0	0	0%	0%	Belum Tercapai	Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu arahan terkait efisiensi anggaran.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Melaksanakan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Tertaksananya Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	22,5	100	4.067.251.000	100	45	55.073.500	200,00%	1,35%	Tercapai	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	Melaksanakan Program Dukungan dan Manajemen	Tertaksananya Program Dukungan dan Manajemen	22,5	100	30.273.286.000	100	67,3	6.209.394.623	299,11%	20,51%	Tercapai	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkantoran yang baik	Subbag Tata Usaha



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI**